



MUKOMUKO

SUMBER BERITA

SABTU, 16 SEPTEMBER 2023

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

RESIGN, GAJI TETAP NGALIR

Kasi Pidsus: Akar hingga Pucuk akan Kita Seret

MUKOMUKO – Setelah dilakukan pencocokan data selama dua hari terhadap 500 pegawai RSUD Mukomuko (MM), penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko akan merkapitulasi jumlah data penerima honor dan gaji. Terutama berkaitan dengan legalitas pegawai tersebut menerima gaji dari RSUD Mukomuko.

Sehingga ditemukan berapa jumlah pegawai fiktif yang tetap dibayarkan gajinya. Ini untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tersebut dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim SH, MH. Pencocokan data penerima gaji dan honor pegawai RSUD Mukomuko telah rampung dilakukan dari (13/9) sampai dengan (14/9), berdasarkan temuan sementara memang ditemukan kejanggalan dalam penerimaan gaji dan honor tersebut.

“Kejanggalan yang kita temukan, dimana pegawai mengaku sudah tidak bekerja dari beberapa tahun yang lalu, namun tanda penerimaan honor dan gaji masih ada. Tentu hal ini menambah catatan bagi kami,” kata Agung.

Agung juga menambahkan, selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang sudah lama berhenti dan belum mampu dihadirkan oleh manajemen RSUD Mukomuko. Tentunya ini menjadi catatan juga bagi penyidik untuk meminta pihak RSUD mendatangkan yang bersangkutan nantinya sesuai waktu yang dijadwalkan kembali. Sebab jika tidak bisa, tidak menutup kemungkinan akan dikategorikan pegawai fiktif.

“Pegawai yang kami periksa sebelumnya mulai dari petugas kebersihan, teknisi, perawat, dokter, hingga direktur. Untuk memastikan dasar mereka menerima upah dan gaji, kemudian benar, tidak menerima,” sampainya.

Lanjutnya, dugaan tipikor keuangan RSUD Mukomuko ini tidak hanya terpusat di honor dan gaji fiktif. Sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara utang obat, dan alat kesehatan (Alkes) yang nilainya mencapai Rp 14 miliar. Setelah itu penyidik juga mendalami dan klaim BPJS Kesehatan, termasuk biaya pengadaan-pengadaan lainnya di RSUD Mukomuko, selama enam tahun.

“Maka dari itu dalam penetapan tersangka ini, sedikit membutuhkan waktu, karena kami memeriksa secara keseluruhan laporan penggunaan anggaran dan memeriksa saksi satu persatu. Namun kami berjanji akan berikan yang terbaik dari akar hingga ke pucuk akan kita seret,” tegasnya.

Agung juga menambahkan, berkaitan dengan calon tersangka, beserta jumlahnya masih belum dapat disampaikan karena proses masih berjalan. Namun untuk mengantongi nama tersangka sudah ada dengan penyidik. Yang pasti tiga tersangka paling sedikit.

“Kami belum bisa sampaikan, namun sudah pasti tiga tersangka itu paling sedikit, sedangkan untuk menghitung Kerugian Negara (KN) tengah dilakukan auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu,” tandasnya.

Diketahui saat ini Kejari Mukomuko tengah melakukan upaya pengungkapan Tipikor keuangan

RSUD Mukomuko, yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Di dalam Tipikor RSUD Mukomuko, Kejari Mukomuko sudah menetapkan perkara ini naik ketingkat penyidikan. Saat ini tengah dilakukan pengumpulan dua alat bukti sebelum dilakukan penetapan tersangka. Baik utang obat, belanja Alat kesehatan (Alkes), belanja kebutuhan habis pakai, honor, gaji pegawai medis dan non medis, serta dana klaim BPJS. Seluruhnya tengah diperiksa satu persatu oleh penyidik Kejari Mukomuko. (pir)